



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 777/VII/2013

1/JULI 2013



DPR RI Kembali Terima Opini WTP dari BPK

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JULI 2013

Minggu pertama bulan Juli ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 25 Juni. Selain itu, dilaporkan mengenai perkembangan pembahasan fungsi Legislasi dan PAW. Berikut rangkumannya:

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Rapat Paripurna 25 Juni 2013

Rapat Paripurna ini meng-agendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan pembentukan tiga Pansus, yaitu Pansus RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Pansus RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.

Sebelumnya, Pimpinan Sidang melaporkan adanya surat masuk dari Presiden, yaitu surat tertanggal 20 Juni perihal RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa, dan surat tertanggal 21 Juni perihal Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Periode 2008-2013. Kedua surat ini diserahkan kepada Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti.

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Ormas, didahului laporan Ketua Pansus H.A. Malik Haramain MSi. Lapornya terbagi atas dua hal, yaitu Laporan Proses Pembahasan, dan Laporan Atas Materi Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I atas RUU Ormas. Dalam proses pembahasan dilaporkan bahwa, Raker secara intensif telah dilakukan dengan wakil Pemerintah, yaitu Mendagri, Menkumham, Kepala BAPPENAS, Kemenlu, Kemenag, Kemensos, Kemenpora, Kapolri, Kejaksaan Tinggi dan Kepala BIN. Rapat Dengar Pendapat dilakukan dengan Komnas HAM. Rapat Dengar Pendapat Umum



dilakukan dengan Ormas-Ormas Keagamaan, diantaranya NU, Muhammadiyah, Walubi, PGI, Hisbut Tahrir, Forum Umat Islam, DDI, KWI, FPI, Persis, Parisada Hindu Dharma dan Konghucu. Ormas Asing diantaranya, *Green Peace*, *The Asia Foundation*, *NDI*, dan *WWF*. Dengan LSM seperti Kontras, PSHK, Walhi, YLKI, ICW, Cetro, yang secara umum tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat. OKP seperti Pemuda Pancasila, HMI, PMII, GMNI, GP Anshor. Dengan para pakar hukum, dan kunjungan kerja dalam negeri di beberapa provinsi.

Berkaitan dengan substansi pokok, dilaporkan bahwa yang menjadi pembahasan mendalam antara lain, berkaitan dengan ketentuan umum. [1] Ormas didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk masyarakat secara sukarela berdasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,

kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi untuk pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. [2] Azas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Selain itu, Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang bersangkutan. [3] Pendirian Ormas [4] Pendaftaran Ormas. [5] Struktur keorganisasian dan kepengurusan. [6] Keuangan Ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Masih beberapa substansi lain yang dilaporkan oleh Ketua Pansus, antara lain: pemberdayaan Ormas, ketentuan tentang Ormas Asing, beberapa hal mengenai pengawasan, larangan dan sanksi dan ketentuan peralihan. Atas dasar



laporan Ketua Pansus ini, beberapa anggota telah menggunakan kesempatan untuk melakukan interupsi, meminta kejelasan atas ketentuan beberapa pasal dan sekaligus rumusan-rumusan yang dianggap masih perlu disempurnakan. Karena banyaknya interupsi, maka rapat paripurna diskors untuk mempertemukan pendapat fraksi-fraksi dengan Pimpinan Pansus.

Setelah diskors, maka rapat paripurna dibuka kembali dan kemudian diputuskan bahwa pembicaraan tingkat dua/pengambilan keputusan ditunda dan akan dijadwalkan kembali.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Menindaklanjuti keputusan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 3 Juni 2013 dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN TA.2014, Badan Anggaran DPR RI sejak tanggal 24 Juni 2013 melakukan Rapat Panja-Panja, yaitu **Panja RKP & Prioritas Anggaran Tahun 2014 dan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA.2014**.

Panja RKP & Prioritas Anggaran Tahun 2014, antara lain membahas tema RKP Tahun 2014 yaitu *"Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan."* Panja juga membahas 15 isu strategis dalam RKP Tahun 2014. Selain itu juga dibahas Prioritas-Prioritas, yaitu **Prioritas 1** (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola); **Prioritas 2** (Pendidikan); **Prioritas 3** (Kesehatan); **Prioritas 4** (Penanggulangan Kemiskinan); **Prioritas 5** (Ketahanan Pangan); **Prioritas 6** (Infrastruktur); **Prioritas 7** (Iklim Investasi dan Iklim Usaha); **Prioritas 8** (Energi); **Prioritas 9** (Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana); **Prioritas 10** (Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik); **Prioritas 11** (Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi); **Prioritas 12** (Prioritas Lainnya di bidang Politik, Hukum dan Keamanan); **Prioritas 13** (Prioritas Lainnya di Bidang Perekonomian) dan **Prioritas 14** (Prioritas Lainnya di bidang Kesejahteraan Rakyat).

Secara paralel sejak tanggal 24 Juni 2013, Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA.2014 juga telah melakukan rapat. Ruang lingkup pembahasannya antara lain membahas asumsi dasar (hasil pembahasan Komisi XI dan Komisi VII), kebijakan PNPB SDA Non Migas, Penerimaan Migas, Bagian Laba BUMN, PNPB Kementerian/Lembaga, Penerimaan Perpajakan Non Migas, Subsidi Energi (BBM & BBN serta listrik) serta defisit dan pembiayaannya.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Beberapa RUU yang sudah masuk dalam prioritas 2013, diharapkan memasuki pembicaraan Tingkat II, antara lain: RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L) atau Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H). RUU ini telah dibahas melalui 8 masa sidang. Karena masih ada keberatan dari masyarakat, terutama terkait dengan

hak masyarakat hukum adat, maka Komisi IV, masih akan melakukan kegiatan untuk mengundang nara sumber/ahli pidana, untuk meminta masukan terkait dengan adanya anggapan pelanggaran HAM, anggapan kriminalisasi masyarakat adat di sekitar hutan. Panitia Kerja juga akan melanjutkan tugas dan direncanakan Raker pengambilan keputusan/ tingkat I dilakukan akhir Juni.

Kedua, RUU **tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3)**. Saat ini pembahasannya akan memasuki tahapan Rapat Tim Sinkronisasi, direncanakan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013, dapat diambil keputusan pada Tingkat I, dan dapat diambil Keputusan Tingkat II untuk mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pada Selasa, 18 Juni 2013, Komisi IX DPR-RI melakukan Raker dengan Menakertrans, Menag, Menlu, dan Menkumham, membahas pemberian amnesti dari Pemerintah Saudi Arabia kepada TKI. Dalam rapat tersebut akhirnya disimpulkan antara lain: Komisi IX mendesak Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan seoptimal mungkin terkait dokumen-dokumen keimigrasian, ijin tinggal dan bekerja WNI *overstayer* dan non-prosedural, serta memberikan SPLP kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik didalam negeri maupun di Arab Saudi dalam rangka menjalankan kewajiban negara atas hak warga negara bekerja di luar negeri dan memenuhi ketentuan kebijakan pemutihan di Arab Saudi.

Selain itu, Komisi IX juga mendesak kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan perlindungan terhadap WNI di luar negeri untuk menjamin keselamatan dan keamanan WNI *overstayer* dan non-prosedural yang sedang mengurus pemutihan ijin tinggal dan kerja di Arab Saudi, terhadap tindakan percaloan, pungutan diluar prosedur dan tekanan lainnya, serta memproses secara hukum pelaku aksi kekerasan terhadap WNI terkait kebijakan penempatan TKI di Arab Saudi dan moratorium penempatan TKI di Arab Saudi, agar permasalahan *overstayer* dan non-procedural di Arab Saudi tidak terjadi lagi dimasa datang.

Permasalahan ini kemudian dilanjutkan pembahasannya dalam forum konsultasi Pimpinan DPR, didampingi Pimpinan Komisi I dan Komisi IX dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Transmigrasi dan Wamenlu Hukum dan HAM. Yang inti permasalahannya sepakat untuk melakukan perpanjangan amnesti kepada para TKI Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi, yang ditargetkan berakhir pada tanggal 3 Juli 2013.

PAW

Pada tanggal 26 Juni, ketua DPR telah mengambil sumpah dua anggota DPR pengganti antar-waktu dari fraksi partai demokrat sesuai dengan Keputusan Presiden No. 76/p/ tahun 2013 tanggal 21 Juni. Anggota-anggota yang diambil sumpahnya yaitu Ir. Nuki Sutarno mewakili Partai Demokrat Dapil Jatim XI untuk Masa Jabatan 2009-2014 menggantikan Drs. H. Ahmad Syafei, dan Sdr. Imam Cahya Abdullah mewakili Partai Demokrat Dapil Kaltim I untuk masa jabatan

2009-2014 menggantikan Dr. H. Taufik Effendi MBA.

KEGIATAN LAIN-LAIN

Pada tanggal 26 Juni 2013, Ketua DPR RI telah membuka seminar yang diadakan oleh IFPPD bekerjasama dengan KPPRI dengan tema “Percepatan Pencapaian MDG’s dan Agenda Pasca 2015 serta Kebangkitan Perempuan Parlemen. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa *Millenium Development Goals* atau yang lebih kita kenal dengan istilah MDG’s adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Millennium oleh 189 Negara anggota PBB di New York, pada September tahun 2000. Indone-

sia sebagai salah satu anggota di dalamnya, turut serta menandatangani delapan kesepakatan untuk mencapai pembangunan global. Delapan target tersebut adalah (1) upaya memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim, (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, (6) memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup serta (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Sebagai Ketua DPR, beliau percaya bahwa peran perempuan parlemen sangat dibutuhkan untuk mensukses-

kan delapan kesepakatan tersebut. Bukan hanya dalam butir pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, namun tujuh target lain dalam program MDGs, adalah bagian dari kehidupan perempuan. Perempuan harus dipandang sebagai mitra sejajar pria, yang mempunyai peranan sama dalam menunjang suksesnya proses percepatan pencapaian MDG’s. Partisipasi politik perempuan dalam parlemen sejauh ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika di periode DPR RI lalu, yaitu tahun 2004-2009 perempuan meraih angka 11%, maka pada periode 2009-2014 perempuan menempati angka 18%. Tentu secara kuantitas ini adalah prestasi yang membanggakan bagi kehidupan politik perempuan.*

DPR RI Kembali Terima Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK

Di saat enam entitas (Kementerian/Lembaga) yang mendapatkan penurunan opini, DPR RI tetap bisa mempertahankan opini tertinggi yang diberikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI sebagai satu-satunya pemeriksa keuangan Negara yang diakui oleh Undang-undang, yakni opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti saat menerima hasil pemeriksaan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) tahun 2012 di Lingkungan AKN (Auditoriat Keuangan Negara) III di Auditorium Gedung BPK, Gatot Subroto, Jakarta Kamis (27/6) tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia dan bangga atas prestasi tersebut.

Win, begitu ia biasa disapa, mengatakan bahwa opini WTP yang diterima DPR RI untuk keempat kalinya itu bukanlah sebuah hadiah, melainkan



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti foto bersama anggota BPK dan para penerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL Tahun 2012.

sebuah hasil dari usaha dan kinerja seluruh elemen di Kesetjengan DPR RI selama ini.

“Alhamdulillah, untuk keempat kalinya, di tahun ini kita (DPR RI) mendapat opini WTP, tentu saya bersyukur akan hal itu. Tapi ini sekaligus tantangan, karena setelah ini kita akan menjalani audit kinerja, BPK sudah mengaudit kinerja kita. Disini akan dilihat kesesuaian produk dengan nilai rupiah yang dikeluarkan, dan itu tantangan baru buat kami,” kata Win.

Ditambahkannya, opini WTP ini sekaligus sebagai motivasi untuk individu-individu di DPR RI, dimana saat ini yang dinilai bukan hanya lembaganya saja, melainkan individu atau karyawan yang harus disosialisasikan.

Diakui Win, pada tahun sebelumnya DPR RI memang mendapatkan opini WTP, namun hal itu bukan berarti tidak ada temuan atau clear sama sekali. Win mengakui masih ada catatan-catatan kecil yang masuk dalam kategori wajar namun tetap harus ditindaklanjuti.



Syukur, hingga saat ini catatan tersebut sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Oleh karena itu, kata Win, ia bertekad akan terus berusaha mempertahankan opini WTP ini, dengan mengedepankan tertib administrasi dan transparansi. Dimana setiap aktivitas keuangan harus dilakukan pencatatan, dengan demikian tidak ada satu rupiah pun uang negara yang keluar tanpa ada catatan.

“Saya tidak tahu apa opini WTP tahun 2012 kita ini ada catatan atau tidak, karena memang baru diserahkan hari ini. Semoga saja tidak ada catatan-catatan khusus dari BPK,” jelas Win.

Sementara itu, Ketua BPK Hadi Poernomo dalam sambutannya mengatakan BPK akan memasang agen konsolidator pada setiap satker (satuan kerja) sebagai *database source* (sumber data) atau dengan kata lain menggunakan sistem e-audit (*electronic audit*).

Terkait hal tersebut, Win mengatakan bahwa pihaknya mendukung langkah positif dari BPK dengan melaksanakan pemeriksaan secara elektronik audit (e-audit) dimana pemeriksaan dilakukan secara online.

“Langkah yang baik dari BPK untuk mempercepat audit atau pemeriksaan dengan mengikuti alur transaksi yang dilakukan Lembaga Negara dan Kementerian sejak awal tahun berjalan, yaitu dengan mendownload secara online di satuan kerja masing-masing. Sehingga otomatis hasil audit bisa diketahui dalam tahun berjalan atau tidak menunggu sampai akhir tahun. Dengan demikian jika ada aktivitas keuangan yang merugikan negara dapat segera diantisipasi,” tambah Win.

Hadi Poernomo mengatakan, tahun ini entitas yang diperiksa BPK bertambah dari 33 entitas di tahun 2011 menjadi 37 entitas di tahun 2012. Dari 37 entitas tersebut sebanyak 70 persen atau sekitar 20 entitas menerima opini WTP, 13 entitas mendapatkan WDP (Wajar dengan pengecualian). Dari jumlah tersebut tiga entitas berhasil meningkatkan opini dari WDP ke WTP, dan 6 entitas mengalami penurunan opini, sementara tahun lalu hanya ada satu entitas yang mengalami penurunan opini.

“Saya bangga dengan DPR RI yang dapat mempertahankan opini WTP untuk keempat kalinya, Sementara ada 6 entitas lain yang mengalami penurunan opini dari WTP ke WDP (Wajar Dengan Pengecualian),” jelas Hadi sambil berharap untuk tahun-tahun ke depannya DPR RI dapat terus mempertahankan opini tersebut. (Ayu) Foto: Wahyu/Parle.

Pengesahan RUU Ormas Ditunda hingga 2 Juli 2013

DPR RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). Panitia Khusus (Pansus) Ruu Ormas diberikan waktu satu minggu melakukan sosialisasi, tanggal 2 Juli 2013 DPR langsung ambil keputusan terhadap RUU Ormas.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, sesuai memimpin Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (15/6). Dalam forum lobby fraksi disepakati, bahwa secara substansial RUU Ormas sudah banyak yang dilalui, hampir semua aspirasi sudah masuk di dalam RUU Pansus ini.

“Disepakati untuk dilakukan tahapan sosialisasi, penyampaian pada seluruh stakeholder RUU Ormas bahwa apa yang sudah diusulkan itu diakomodir dalam Pansus, Insya Allah tanggal 2 Juli kita langsung ambil keputusan terhadap RUU Ormas,” tegas Taufik.

Mengingat pembahasan RUU Ormas

sudah terlalu lama, sudah 2 tahun lebih, sehingga Pansus ini perlu *limit* waktu. “Satu minggu harus kita putuskan, tetapi disela-sela satu minggu itu ada forum semacam sosialisasi terhadap seluruh stakeholder,” tegasnya.

Dikatakannya, secara substansial sudah tidak ada hal yang terlalu menjadi permasalahan, hanya mungkin masalah redaksional kaitan dengan subtansi-subtansi yang sifatnya harmonisasi dan sinkronisasi.

Menurut Taufik berdasarkan informasi Ketua Pansus Ormas, beberapa poin aspirasi dari seluruh ormas sudah diakomodir. Artinya diakomodir itu dalam konteks bernegara dan berbangsa, yang tidak merugikan negara.

“Kalau kemudian ada ormas yang tidak mau diaudit dalam kaitan aspek pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan kan tidak lucu juga,” imbuhnya.



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Taufik Kurniawan menegaskan RUU Ormas ini inisiatif dari DPR-RI. Justru DPR ini yang melihat bahwa ini perlu ditata ulang karena UU Ormas No.8/1985 yang lalu, jedanya sudah terlalu jauh. Sudah terjadi pergantian rezim, sekarang sudah Reformasi, sehingga perlu ada perubahan RUU Ormas.

“Karena RUU Ormas merupakan inisiatif DPR kemudian diambil keputusan melalui voting kan juga gak lucu,

sehingga ada perlu satu tahapan sosialisasi penyempurnaan, harmonisasi, manakala seluruh substansi yang diajukan oleh ormas sudah diakomodir,” tegasnya.

Dikatakan, ormas milik kita semua,

juga milik masyarakat, sehingga kalau kemudian ada yang dikesankan ada fraksi yang mendukung-ada fraksi yang menolak, itu sikap yang tidak pas. Selain itu, aspek pruden atau kehati-hatian itu dalam mengambil keputusan. DPR optimis walaupun ada

uji materi itu tidak akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Insya Allah kita siap jika harus di *Yudicial Riview*,” tegas Taufik Kurniawan. (as)/
foto:iwan armanias/parle.

Paripurna DPR Sepakati Sosialisasi RUU Ormas

Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (25/6) menyepakati untuk memberi waktu 1 (satu) minggu untuk sosialisasi RUU Ormas, dan pada tanggal 2 Juli 2013 nanti Rapat Paripurna bisa memutuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas).

“Disepakati adanya semacam *time limit* untuk kita semua, untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi politik yang terakhir, hal ini demi menghargai waktu dan kerja keras Ketua Pansus RUU Ormas dan kawan-kawan, selama 2 (dua) tahun mereka bekerja demi mengakomodir seluruh *stakeholder* yang terkait dalam proses pembahasan RUU ini,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin Rapat Paripurna.

“Saya kira ini sudah sangat jelas karena RUU ini produk usul inisiatif DPR, maka ini tanggung jawab pimpinan dan semua fraksi di DPR, nanti dalam rapat Paripurna 2 Juli mendatang, tidak akan ada lagi argumentatif, hanya mengambil keputusan untuk disahkan menjadi UU Ormas,” tegas Taufik.

Menanggapi hal itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima sepakat dengan hal tersebut, bahwa memang perlu ada jalan tengah (sosialisasi) dan sepakat substansi tidak dipersoalkan lagi didalam RUU Ormas ini.

Namun tambahnya, sesuai dengan pasal 6 mengenai tugas dan kewenangan anggota DPR bahwa DPR perlu menampung dan menyerap aspirasi yang berkembang selama proses sosialisasi tersebut. “Kita jangan terlalu *kekeh*, nanti seolah-olah sosialisasi hanya dipersepsikan *top dor* saja, dalam



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (kiri) didampingi Menkumham Amir Syamsudin, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, dan Mendagri Gamawan Fauzi berbincang-bincang sebelum Paripurna membahas RUU Ormas.

proses tadi harus jelas secara kuantitatif disebutkan pasal-pasal mana saja yang dipersoalkan oleh ormas, jadi nanti jika dikuantitatifkan pasal per pasal, kecenderungan mana yang masih dianggap keberatan oleh masing-masing ormas yang bisa diselesaikan dalam sosialisasi itu” tegasnya.

Rapat Paripurna yang mengagendakan pengesahan RUU Ormas ini sempat diskors karena berlangsung cukup alot, skorsing rapat diperlukan guna dilakukannya forum lobi.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain dihadapan Rapat Paripurna DPR melaporkan hasil akhir pembahasan RUU Ormas ini. Dalam laporannya, Pansus RUU Ormas menurut Haramain, mulai bekerja sejak Tanggal 19 Oktober 2011 atau sudah

bersidang sejak Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012 hingga saat ini Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013 (7 kali masa Persidangan).

Dalam pembahasan, jelas Haramain, baik di Pansus, Panja, maupun di Timus/Timsin terjadi diskusi dan perdebatan yang cukup mendasar terhadap beberapa substansi pokok, materi, maupun rumusan RUU tentang Ormas. “Adapun beberapa substansi pokok yang menjadi pembahasan secara mendalam antara lain, pembahasan ketentuan umum, azas ormas, pendirian ormas, pendaftaran ormas, organisasi kedudukan dan kepengurusan, keuangan ormas, badan usaha ormas, pemberdayaan ormas, ormas asing, pengawasan, larangan dan sanksi dan ketentuan peralihan.”(nt)/
foto:wahyu/parle.

DPR Minta Kurikulum Pendidikan Kedokteran Diperbaiki



Anggota Komisi IX DPR Charles J. Mesang.

Terkait program internship bagi dokter yang telah lulus studi pendidikan kedokteran dan lulus uji kompetensi, Komisi IX DPR RI meminta kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, agar kurikulum pendidikan kedokteran diperbaiki.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX, Charles Mesang (F-PG) saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua AIPKI, Ketua Umum IDI, Ketua KKI, Ketua KIDI dan Tim Evaluasi

Internship Dokter.

Menurut Charles, masalah Internship lahir karena adanya kurikulum KBK. Dimana ada keraguan daripada kemampuan dokter yang dihasilkan.

“Kalau ini masalahnya, berarti kurikulumnya yang harus diperbaiki, sehingga bagaimana dia menghasilkan dokter yang profesional. Internship ini bisa hilang. Kemudian kurikulum dikembalikan seperti jaman dulu, begitu selesai langsung diakui sebagai dokter kemudian ditempatkan dan tidak ada masalah,” jelas Charles.

Kalau memang demikian, kata Charles, berarti kurikulum KBK tidak mempersiapkan dokter yang kompeten dan profesional, sehingga lahir internship ini.

Adanya internship di tiap-tiap daerah berbeda-beda, jelas Charles, terlepas dari hasil survey. Charles menjelaskan, anaknya adalah seorang dokter yang ikut internship di NTT dimana pembimbingnya adalah dokter PTT. “Apa yang dia dapat di situ. Memang di NTT ada beberapa dokter yang dididik sebagai pendamping tapi di RS Umum.

Tetapi di sana ada dua rumah sakit itu dokter PTT,” kata Charles.

Dirinya sependapat dengan teman satu Komisioner, Okky Asokawati, dimana program internship dimasukkan saja dalam kurikulum studi pendidikan kedokteran. “Seandainya kurikulum diperbaiki supaya internship jangan sampai satu tahun dimasukkan saja dalam kurikulum, dari sini jelas, dosen-dosennya jelas, kan begitu kira-kira,” tegasnya.

“Jika dia harus internship dia harus menunggu, kemudian harus pergi ikut PTT lagi, menunggu lagi, berapa waktu yang dia buang,” imbuhnya.

Mengenai internship ini, menurut pendapatnya, kalau memang mau dilanjutkan, harap dipikirkan bagaimana kalau dikaitkan dengan PTT, sehingga mahasiswa tidak dirugikan.

“Internship ini kalau memang mau dihilangkan bisa dimasukkan dalam kurikulum dengan catatan kurikulum diperbaiki sehingga seperti jaman dulu begitu selesai bisa jadi dokter,” harap Charles. (sc)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VI DPR Tinjau PT. PAL Surabaya



Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima saat memimpin Kunjungan spesifik ke PT. PAL (Persero), Surabaya.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI mengadakan peninjauan ke lokasi PT. PAL (Persero) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk melihat langsung proses produksi kapal laut tersebut. Betapa luas dan lengkapnya prasarana yang tersedia di PT. PAL (Persero).

Kenyataan ini membuat Tim Komisi VI DPR RI lebih yakin bahwa PT. PAL (Persero) merupakan salah satu BUMN strategis yang bergerak di bidang Industri galangan kapal. “Kegiatan utama dari PT. PAL (Persero) adalah memproduksi kapal niaga dan kapal perang sebagai bagian dari alutsista, memberikan jasa pemeliharaan dan

perbaikan kapal, rekayasa untuk industri minyak dan gas, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) saat meninjau di lokasi PT. PAL (Persero), Surabaya, Sabtu (22/6’13).

Lebih lanjut, Aria Bima mengatakan, sebagai bagian dari BUMN strategis tentunya PT. PAL (Persero) dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan sumbangsih bagi pendapatan negara melalui deviden.

“Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah PT. PAL (Persero) yang telah merumuskan strategi transformasi perusahaan, diantaranya melalui modernisasi fasilitas dan sarana produksi, meningkatkan produktivitas termasuk *on time delivery* serta meningkatkan aspek kompetitif perusahaan,” kata Aria Bima seraya menambahkan diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, organisasi dan peningkatan kualitas teknologi informasi yang dapat menunjang operasional perusahaan.

Ia berharap PT. PAL (Persero) dapat

berkontribusi dalam peningkatan kinerja anak perusahaan dan perusahaan afiliasi, yaitu PT. Alstom Power Energy Systems, PT. Power System Service, PT. GE Technology dan PT. PAL Marine Service.

Dia menambahkan, perlunya peningkatan sinergi antar BUMN dalam hal ini PT. PAL (Persero) yang telah melakukan kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) dalam hal pembuatan kapal. “Kualitas sinergi ini terus diperbaiki dan ditingkatkan sehingga akan saling mendukung kinerja BUMN,” ungkapnya. *(iw)/foto:iwan armanias/parle.*

Komisi VII DPR Setujui RUU Keantariksaan



Anggota Komisi VII DPR M. Ali Kastella saat menyampaikan pandangan mini Fraksi Hanura terhadap RUU Keantariksaan.

Komisi VII DPR menyetujui RUU Keantariksaan untuk disetujui pada Pengambilan Keputusan Tingkat II Rapat Paripurna mendatang.

“RUU Keantariksaan dibutuhkan bagi sektor keantariksaan di Indonesia, karena itu Partai Hanura menyetujui RUU Keantariksaan untuk menjadi UU,” ujar anggota DPR M. Ali Kastella dari Partai Hanura, saat menyampaikan pandangan mini terhadap RUU Keantariksaan, di Gedung Nusantara I, Kamis sore, (27/6).



Anggota Komisi VII DPR Milton Pakpahan.

Anggota DPR Milton Pakpahan (F-PD) mengatakan, UU Keantarik-

saan merupakan bukti negara kita dalam mencermati perkembangan keantariksaan serta pengelolaan maupun perkembangan teknologinya.

“Pemerintah telah memahami bahwa keantariksaan dapat berguna untuk berbagai bidang seperti penelitian, militer maupun pengembangan satelit,” terangnya.

Menurutnya, Keantariksaan di Indonesia masih kurang berkembang dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti India, Jepang. “Ini bagian penting untuk mengejar ketertinggalannya agar kita sejajar dengan negara Asia lainnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, RUU Keantariksaan bukti keseriusan Komisi VII DPR dalam merumuskan perundang-undangan dan kita mengharapkan dapat berjalan dengan baik.

Anggota DPR Satya W. Yudha (F-PG) mengatakan. Indonesia masih memiliki ketergantungan dengan negara lain dalam pemanfaatan keantariksaan dan mengeksplorasi daratan maupun atmosfer. “Kita harapkan kegiatan keantariksaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu melindungi warga negaranya,” tambahnya.

Menurut Satya, selama ini belum ada UU yang mengatur keantariksaan hanya sebagian saja seperti telekomunikasi dan penyiaran. “Memang belum ada payung hukum karena itu kita perlu UU ini,” ujarnya. *(si)/foto:iwan armanias/parle.*



Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha.

Komisi IV Bentuk Panja RTRWP Kepulauan Bangka Belitung

Komisi IV telah mendapatkan penjelasan dari Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan tentang Tata Ruang wilayah Provinsi Babel. Panja akan segera tinjau usulan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP Kepulauan Bangka Belitung.

“Komisi IV akan menindaklanjuti usulan Tim Terpadu dengan membentuk Panitia Kerja RTRWP Kepulauan Bangka Belitung dan akan melakukan kunjungan spesifik ke provinsi terkait,” kata Wakil Komisi IV Firman Soebagyo, setelah RDP dengan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, di Gedung DPR, Senin (24/6).

Menurut Firman, jika tidak ada keberatan dari Bupati atau Walikota terkait maka akan segera ditindaklanjuti dalam Rapat kerja dengan Pemerintah untuk mendapatkan keputusan.

Sedangkan jika masih ada keberatan maka bisa dilakukan revisi-revisi atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010 dapat dilakukan setelah penetapan tapal batas yang dilakukan secara

parsial. “Kunjungan spesifik ini guna mendapatkan masukan,” tegasnya.

Firman Soebagyo menjelaskan diusulkan 155.763 ha atau 23,08% dari total luas kawasan hutan provinsi Babel 674.934 ha, yang disetujui sebesar 69,1% atau 10.878 ha dari usulan 15.762 ha, dan ini tidak perlu mendapatkan persetujuan Komisi IV DPR dan telah mendapatkan keputusan Menhut. Sedangkan yang perlu mendapatkan persetujuan DPR yaitu seluas 4.452 ha atau sebesar 18,88% dari usulan 136.810 ha.

Anggota Komisi IV Siswono Yudo Husodo dapat merasakan kesulitan Pemerintah Daerah di banyak provinsi yang saat ini masih banyak yang RTRWP belum final yang berakibat kesulitan dalam upaya pengembangan wilayahnya.

Khusus mengenai Provinsi Kepulauan Babel, dasar pengajuan Pemerintah Provinsi Babel telah dilakukan pengkajian oleh Tim Terpadu, “Saya berharap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang perlu



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo.

mendapatkan persetujuan DPR dalam waktu dekat sudah dapat diputuskan, sehingga Provinsi Babel mendapat kepastian mengenai revisi RTRWP Babel,” katanya.

Dia yakin hal ini pasti tidak akan dapat memuaskan Pemerintah Daerah Babel karena tidak seluruhnya disetujui. “Dari sekitar 110 ribu ha lebih yang dimohonkan, yang disetujui hanya sekitar 23 ribu ha saja,” imbuh Siswono. (as)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Minta KPU Sandingkan Data Pemilih Dengan Pemerintah

Dalam rangka sinkronisasi sistem untuk menghasilkan data pemilih yang akurat, Komisi II DPR meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk sandingkan sistem dan data hasil pemuktahiran data pemilih yang dimiliki oleh KPU dengan sistem dan data kependudukan dari Pemerintah pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang.

“Jadi kira-kira nanti konsepnya, kita (Komisi II DPR-red) akan upayakan untuk diadakan rapat kembali dengan menghadirkan Pemerintah, KPU, pakar IT, guna mendiskusikan hal tersebut, agar ke depannya, problem pemuktahiran data pemilih atau DPT yang karut



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

marut itu tidak terulang, sehingga tidak ada lagi dugaan-dugaan atau hal-hal yang terkait dengan sistem

dan hasilnya yang tidak akurat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo saat RDP dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di DPR, Jakarta, Senin (24/6).

Komisi II DPR, kata Arif, juga meminta KPU untuk lebih hati-hati dan cermat dalam melaksanakan proses verifikasi administrasi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota sehingga dapat menjamin akurasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi calon anggota tersebut.

“Diharapkan KPU dapat senantiasa berkomunikasi insentif dengan Bawaslu dan seluruh penghubung Parpol da-

lam rangka perbaikan proses verifikasi persyaratan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota," tegas Politisi dari PDIP ini.

Sementara itu dalam laporannya dihadapan Komisi II DPR, Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan Daftar Calon Sementara telah diumumkan pada tanggal 13 Juni 2013 berdasarkan Keputusan KPU No.486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 dan No. 501/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 sebanyak 6.522 Calon Sementara dari 12 Parpol pada 77 Dapil, dengan rincian 4.101 calon laki-laki dan 2.451 calon perempuan (37,39 %).

"Dari 6.637 bakal calon yang masuk ke KPU pada masa perbaikan syarat administrasi 6.552 bakal calon ditetapkan memenuhi syarat dan masuk dalam DCS, sedangkan 87 bakal calon yang tidak dapat ditetapkan dalam DCS, karena tidak memenuhi syarat dengan berbagai alasan," kata Husni.

Selanjutnya, ujarnya, terdapat 25

bakal calon yang tidak memenuhi syarat administrasi bakal calon seperti tidak sahnya ijazah, formulir BB tidak memenuhi syarat, pencalonan ganda, dan KTP yang sudah tidak berlaku.

Namun, tambahnya, dari 25 bakal calon yang tidak memenuhi syarat tersebut, membawa dampak terhadap bakal calon yang sebenarnya sudah memenuhi syarat, tetapi menjadi tidak memenuhi syarat pada komposisi penempatan calon perempuan yang mengakibatkan gugurnya seluruh calon dalam dapil bersangkutan.

"Dalam penetapan DCS KPU terpaksa mencoret bakal calon dari 5 Parpol pada 8 (delapan) daerah pemilihan, hal ini dikarenakan pada saat verifikasi perbaikan syarat calon ditemukan bakal calon perempuan yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dalam hal penempatan calon perempuan, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pengajuan bakal calon," terangnya.

Tidak terpenuhinya syarat pengajuan bakal calon, menurut Husni, sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No.7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Kab/Kota bahwa pengajuan bakal calon perempuan dari setiap 3 orang bakal calon.

Di kesempatan ini, Husni juga memaparkan, bahwa KPU saat ini sedang melaksanakan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara hingga tanggal 9 Juli 2013. "KPU melakukan monitoring terhadap penyusunan DPS melalui aplikasi Sidalih, monitoring dan supervise secara *sampling*, melalui email dan voice terhadap proses penyusunan DPS," jelasnya.

la menambahkan, KPU menggunakan Sidalih untuk membantu PPS dan Pantarlih dalam menyusun DPS, dan selanjutnya hasil penyusunan DPS pada tanggal 10 Juli 2013 yang akan datang akan dikumpulkan untuk ditayangkan di website KPU pada tanggal 11 Juli 2013. (nt)foto:wahyu/parle

Baleg Pastikan Tidak Akan Ada Ayat Hilang Pada RUU Pertembakauan



Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Dimiyati Natakusumah didampingi Ketua Baleg Ignatius Mulyono dan Wakil Ketua Anna Mu'awanah.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI (Baleg), Ahmad Dimiyati Natakusumah memastikan tidak akan ada ayat yang hilang dalam pembahasan RUU tentang Pertembakauan.

"Pro dan Kontra terhadap sebuah RUU wajar, tapi yang pasti tidak akan ada ayat-ayat yang hilang seperti dulu," kata Dimiyati saat menerima audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Uni-

versitas Indonesia (BEM UI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/6)

Dimiyati memberikan apresiasi terhadap masukan dan kritik yang disampaikan BEM UI terkait RUU Pertembakauan. Dim, demikian sapaan akrabnya, senang dengan adanya BEM UI, yang betul-betul mengkritisi dan mengawal terhadap reformasi terutama terkait dengan perundang-undangan, dimana jangan sampai suatu perundang-undangan sampai berpihak pada salah satu pihak saja.

Dimiyati berharap, sebelum memberikan masukan kepada Baleg, BEM UI sudah mempersiapkan sandingan, naskah RUU dan naskah akademiknya. Sehingga, Baleg dapat mengetahui dengan jelas RUU seperti apa yang diharapkan BEM UI.

"Jadi adek-adek datang ke sini sudah membawa sebuah sandingan, bukan hanya penolakan tapi juga argumen-

tasi-argumentasi dan data yang secara variable, dan identifikasi masalah dan analisisnya jelas,” terang politisi dari Fraksi Persatuan Pembangunan ini.

Dijelaskan Dimiyati, bahwa Prolegnas disusun oleh pemerintah dan DPR. Tanpa DPR atau tanpa pemerintah tidak jadi prolegnas. Pemerintah tidak menyetujui satu saja RUU, maka prolegnas tidak akan terwujud.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan PP, maka pemerintah itu menyetujui RUU Pertembakauan masuk walaupun ada perdebatan internal di legislatif sendiri, bukan di internal pemerintah. Ada yang di *drop*/dihilangkan karena tidak disetujui oleh Rapat Paripurna, dan ada yang dibintang.

“Sebetulnya dalam ketentuan-ketentuan itu tidak ada dibintang, bintang itu sebuah tanda berarti masih ada yang harus diselesaikan”, jelas Dimiyati.

Maka oleh sebab itu, Baleg masih menampung masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk BEM UI, dalam penyusunan draft RUU Pertembakauan.

Tentunya, kata Dimiyati, dari berbagai masukan yang diterima Baleg, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan RUU Pertembakauan ini, seperti BEM UI sendiri.

“Ada yang setuju dengan RUU ini seperti masyarakat petani tembakau di Jawa Timur, industri tembakau, bahkan mungkin industriawan tembakau ini deg-degan juga karena DPR sedang membahas ini, mengapa, karena industri rokok ini berpikir nanti RUU ini berpihak pada petani, ini berpihak pada buruh, berpihak pada cukai, begitu hasilnya ini berpihak pada kesehatan. Begitu UU berpihak pada salah satu,” papar Anggota Komisi III DPR RI.

Dimiyati menjelaskan bahwa dirinya

termasuk salah seorang perokok pasif, dimana ketika datang ke Jawa Tengah, masyarakat di sana meledak-ledak mau memisahkan diri jika RUU ini disahkan. Demikian pula ketika datang ke petani tembakau di Jawa Timur dan NTB.

“Jadi ada yang harus kita atur dan ada yang tidak diatur. Saya mengharapkan mahasiswa memberikan masukan atau kritik seluas-luasnya, curiga boleh tapi jangan suudzon,” tegasnya.

“Silakan kawal RUU ini sehingga dapat menghasilkan produk UU yang berkualitas dalam arti semua pihak terpenuhi terutama infaknya terhadap kesehatan. Ini juga harus dikawal bagaimana kerugian terhadap kesehatan masyarakat. Saya yakin kalau mahasiswa BEM UI ini sebagai petani tembakau pasti berpikiran sama dengan petani disana. Jangan salah para petani tembakau itu datang ke sini juga memberikan aspirasinya,” tambahnya.

(sc)/foto:ry/parle.

BK DPR Periksa Pimpinan Baleg Terkait RUU Pertembakauan

Ketua Badan Kehormatan - BK DPR RI Trimedya Panjaitan menjelaskan telah memeriksa Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) terkait dugaan penyimpangan pembahasan RUU Pertembakauan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan LSM JPDTI (Jaringan Pengendali Dampak Tembakau Indonesia).

“Laporan JPDTI sudah kita tindak lanjut dengan meminta keterangan dari Pimpinan Baleg, ada Pak Ignatius Mulyono, Pak Dimiyati dan Ibu Ana Muawanah. Kita panggil pada saat rehat rapat paripurna karena waktu kita memang terbatas,” ungkapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/13).

Dalam pertemuan tersebut menurutnya Pimpinan Baleg menjelaskan putusan rapat paripurna untuk memberi tanda bintang RUU Pertembakauan belum dicabut. “Tadi menurut Baleg tanda bintang itu belum dicabut karena pencabutannya mesti melalui



Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedya Panjaitan.

paripurna. Pembuatan Panja oleh Baleg dalam rangka upaya mencabut tanda bintang ini,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut BK juga mendapat informasi bahwa Baleg mengikuti pertemuan Round

Table yang diselenggarakan oleh pihak industri rokok, Sampurna. “BK mengingatkan agar dalam kasus yang sensitif seperti ini mesti ada kehati-hatian dalam menerima undangan.” Politisi FPDIP ini menambahkan proses pemeriksaan akan diteruskan pada kesempatan selanjutnya.

Sebelumnya LSM JPDTI dipimpin mantan Ketua IDI Kartono Mohamad mengadukan dugaan pelanggaran kode etik oleh Baleg. RUU Pertembakauan yang telah dibintang atau diputuskan ditunda pembahasannya oleh rapat paripurna menurut mereka ternyata masih dibahas Baleg.

“JPDTI beberapa tahun lalu pernah menyodorkan draf RUU Pertembakauan dalam versi kita tetapi diabaikan, ketika RUU Pertembakauan diusulkan kelompok produsen rokok ternyata segera ditindaklanjuti,” demikian Kartono. (iky) /foto:Doc./parle.

DPR Minta Masukan Untuk *Fit & Proper Test* Anggota KPI



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan bahwa Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas usul masyarakat melalui *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) secara terbuka. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

DPR sudah menerima 27 nama calon anggota dari pemerintah, yang kemudian akan diuji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 9 (sembilan) Anggota KPI Pusat untuk Periode 2013-2016. Daftar nama calon anggota KPI tersebut adalah:

Menindaklanjuti usulan nama calon anggota dari pemerintah, DPR RI merencanakan akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap

27 calon anggota pada tanggal 2 dan 3 Juli 2013. Dengan adanya pengumuman ini, DPR RI meminta masukan dari masyarakat mengenai 27 calon anggota KPI Pusat tersebut untuk mendampingi Anggota KPI Pusat yang sesuai dengan harapan kita semua.

Masukan dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Gedung MPR/DPR, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 atau melalui alamat email: set_komisi@dpr.go.id. (sf)
foto:ry/parle

NO	NAMA	PENDIDIKAN	LATAR BELAKANG
1.	AGATHA LILY	IlmuKomunikasi	Asisten KPI Pusat
2.	AMIRUDIN, DRS., MA	Antropologi	Dosen
3.	ANOM SURYA PUTRA, SH	Hukum	AnalisisHukum
4.	AZIMAH SUBAGJO	IlmuPolitik	KPI Pusat/LSM
5.	BEKTI NUGROHO	IlmuSosialIlmuPolitik	DewanPers
6.	DADANG RACHMAT HIDAYAT, DR	Komunikasi	KPI Pusat/Dosen
7.	DANANG SANGGA BUWANA, MSi	IlmuKomunikasi	IJTV/Dosen
8.	EFFY ZALFIANA RUSFIAN, DR	IlmuKomunikasi	Dosen
9.	EZKI TRI REZEKI WIDIANTI, SH, MA	International Development Studies	KPI Pusat/Jurnalis
10.	FAJAR ARIFANTO ISNUGROHO, H, SSos, MSi	IlmuKomunikasi	KPID Jawa Timur
11.	FAKHRI WARDHANI, SSos	Aministrasi Publik	KPID Kalsel
12.	FREDDY MELMAMBESSY	Manajemen	Eks. KPID Maluku
13.	IDY MUZAYYAD, MSi	IlmuKomunikasi	KPI Pusat/Dosen
14.	IRWAN SANJAYA	Hubungan Internasional	Asisten KPI Pusat
15.	ISWANDI SYAHPUTRA, DR, S.Ag, MSi	Kajian Budaya & Media	KPI Pusat/Dosen
16.	IWAN KESUMAJAYA, SH, MHum	Hukum	Dosen
17.	JUDHARIKAWAN, DR, SH, MH	IlmuHukum	KPI Pusat/Dosen
18.	KOMANG SUARSANA, Drh, MMA	Manajemen	KPID Bali
19.	NINA MUTMAINNAH ARMANDO	IlmuKomunikasi	KPI Pusat/Dosen
20.	MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH, SH, SS, MSi	Hukum	LSM
21.	MUHI BUDDIN	IlmuKomunikasi	Dosen
22.	MUTIARA DARA UTAMA MAUBOI	IlmuKomunikasi	KPID NTT
23.	RIRIT YUNIAR, DR., SSos., MHum	Kesenian	Dosen
24.	ROMI FIBRI HARDIANTO	Kedokteran Gigi	Jurnalis
25.	RUSDIN TOMPO, SH	Hukum	KPID Sulsel/Dosen
26.	SAMSUL RANI, Sag., MSi	IlmuKomunikasi	KPID Kalsel/Dosen
27.	SUJARWANTO RAHMAT M. ARIFIN, S.Si	Sosial	KPID DIY

30 Orang Komisi XI jadi Pansus RUU Perubahan Harga Rupiah

Rapat Paripurna, Selasa (25/6) menyepakati Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi terdiri dari 30 orang anggota Komisi XI. Namun untuk nama-nama anggota akan diputuskan pada rapat paripurna berikutnya.

“Kita sepakati pembentukan Pansus RUU Redenominasi yang jumlahnya sebanyak 30 orang dari Komisi XI. Sebanyak sembilan fraksi di DPR akan menunjuk anggotanya untuk berada di dalam Pansus RUU Redenominasi ini,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, saat memimpin rapat paripurna di Gedung DPR, Selasa (25/6).

Pembentukan Pansus ini, tambah Taufik, merupakan tindak lanjut DPR terhadap draf RUU Redenominasi yang diusulkan pemerintah untuk dibahas bersama DPR. Sebelum Pansus memulai kerjanya, maka akan dipilih terlebih dahulu pimpinan Pansusnya.

“Harus dibentuk dulu struktur Pansusnya, kemudian disepakati pimpinannya. Nanti secepat mungkin Pansus akan memulai kerjanya. Minimal pemilihan pimpinan Pansus bisa dalam Masa Sidang ini,” tambah Taufik.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Anna Mu`awanah menyatakan, nama-nama yang diusulkan fraksinya untuk menjadi anggota Pansus akan melakukan rapat untuk memilih ketua dan wakil ketua Pansus. Ia berharap Pansus ini dapat bekerja optimal untuk memproses RUU usulan pemerintah ini, sehingga pembahasan bisa selesai sebelum masa jabatan DPR berakhir pada 2014. (sf)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

RUU Ormas : Langkah Persuasif Dilakukan Sebelum Pengenaan Sanksi



Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain.

Ketua Pansus RUU Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam laporannya dihadapan Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (25/6) menjelaskan bahwa dalam RUU Ormas mengatur tentang larangan dan sanksi yang harus dipatuhi oleh Ormas.

“Pengenaan sanksi tersebut di-

lakukan dalam kerangka pembinaan, karena itu dilakukan upaya persuasif terlebih dahulu sebelum pengenaan sanksi,” kata Abdul Malik Haramain.

Pengenaan sanksi tersebut, jelas Haramain, berupa peringatan tertulis, penghentian bantuan dan atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan

pencabutan Surat Keterangan Terdaftar atau pencabutan status badan hukum diberikan secara bertahap dan berjenjang sesuai tingkat pelanggarannya.

“RUU ini memastikan bahwa pencabutan SKT dilakukan dengan meminta Fatwa MA terlebih dahulu, sedang pencabutan badan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” jelas politisi dari PKB ini.

Selain itu tambahnya, diatur adanya cantolan ketentuan pidana dan perdata yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pembahasan larangan dan sanksi ini, merupakan salah satu dari 12 substansi pokok yang menjadi pembahasan dan diskusi mendalam di rapat Pansus, Panja, Timus atau Timsin. Adapun ke 12 substansi pokok itu yaitu, pembahasan ketentuan umum, azas ormas, pendirian ormas, pendaftaran ormas, organisasi kedudukan dan kepengurusan, keuangan ormas, badan usaha ormas, pemberdayaan ormas, ormas asing, pengawasan, larangan dan sanksi dan ketentuan peralihan. (nt)/foto:iwan armanias/parle.

Dipilih 42 Anggota, Agus Joko Gantikan Taufiqurrachman Ruki

Hasil voting tertutup Komisi XI DPR akhirnya memilih Agus Joko Pramono sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pengganti Antar Waktu. Agus akan menggantikan Taufiqurrachman Ruki yang telah memasuki masa pensiun.

“Komisi XI memilih saudara Agus Joko Pramono yang akan menggantikan Ruki dari sisa pengabdianya. Nama yang terpilih akan dibawa ke Paripurna DPR untuk disahkan,” kata Ketua Komisi XI Emir Moeis di Gedung Nusantara I, Selasa (25/6) malam.

Wakil Ketua Andi Timo Pangerang menyatakan, dari 56 anggota Komisi XI, Agus Joko mendapat dukungan 42 suara, Muchayat memperoleh 12 suara. Sedangkan Eddy Rasyidin dan Gunawan Sidauruk masing-masing 1 suara.

“Kami tentu harus menghargai perbedaan pilihan. Dari hasil voting, terlihat memang ada perbedaan suara meskipun Agus Joko memperoleh suara yang dominan. Selain itu teman-teman juga melihat pengalaman dia saat ini sebagai Tenaga Ahli BPK,” ujar Andi Timo.

Dengan terpilihnya Agus, Andi berharap kandidat No 11 ketika *fit and proper test* ini bisa langsung bekerja sama dengan anggota BPK lainnya. Walaupun ia tidak mengetahui nantinya Agus akan ditempatkan di bidang apa, karena



Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang.

hal itu akan ditentukan oleh internal BPK.

Dengan terpilihnya Agus Joko, berarti tak satu pun dari tiga nama yang direkomendasikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada Komisi XI yang menjadi pengganti Ruki. Sebelumnya, DPD merekomendasikan tiga nama, yakni Hekinus Manao, Eddy Rasyidin, dan Rini Purwandari. Namun hanya Eddy Rasyidin yang dipilih oleh satu anggota Komisi XI. (sf)/foto:odjie/parle.

Iman Menyelamatkan Peradaban



Peringatan Isra Mi'raj di Masjid Baiturrahman yang digagas tiga lembaga, MPR, DPR, dan DPD.

Iman menyelamatkan banyak generasi dari bahaya kehancuran peradaban. Generasi beriman harus tumbuh

dari rumah. Tak hanya beriman, kita juga butuh berilmu. Berilmu dan beriman merupakan kombinasi dari pribadi

yang lengkap.

Inilah yang mengemuka dari peringatan Isra Mi'raj di Masjid Baiturrahman, Rabu (26/6). Acara yang digagas tiga lembaga, MPR, DPR, dan DPD ini, mengambil waktu tepat di hari anti narkoba internasional. Hadir sebagai penceramah adalah Fikri Zainuddin MZ. Para pejabat di tiga lembaga dan para pegawai ikut hadir menyimak acara dengan baik.

Fikri dalam ceramahnya menjelaskan bahwa rumah menjadi tempat lahirnya anak-anak yang benar dan pintar. Untuk menjadi benar dibutuhkan iman. Dan untuk pintar dibutuhkan ilmu. Tidak mudah, memang, melahirkan generasi lengkap yang memiliki kombinasi iman dan ilmu. Setidaknya dengan peringatan ini, kita diingatkan kembali untuk melihat sejauh mana kapasitas

keimanan dan keilmuan kita.

Zaman terus bergulir. Ancaman penghancuran generasi silih berganti menghampiri. Salah satunya adalah bahaya narkoba yang punya daya hancur luar biasa terhadap generasi. Dalam sambutan pembukanya atas

nama Sekjen DPR RI, Setyanta Nugraha Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, mengatakan, bersamaan dengan Isra Mi'raj ini, kita harus melakukan langkah nyata untuk memerangi narkoba.

Narkoba sudah menyerang usia

produktif. Dan saat ini ada aksi global untuk memperingati hari anti narkoba se-dunia. Dengan Isra Mi'raj ini pula, kita harus hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Dari kehancuran generasi karena narkoba, menuju generasi sehat. (mh)/foto:odjie/parle.

Timor Leste Minta Bantuan Indonesia Sediakan SDM Berkualitas



Ketua BKSAP Surahman Hidayat foto bersama Anggota BKSAP dan Ketua Komisi F Palemento Nacional De Timor Leste.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengapresiasi dan menyambut baik rencana pemerintah Timor Leste mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia di Timor Leste. Hal tersebut disampaikan Ketua BKSAP, Surahman Hidayat saat menerima kunjungan Komisi F Palemento Nacional De Timor Leste, Selasa (25/6) di ruang rapat BKSAP, Senayan Jakarta.

Selain itu, Surahman juga mendukung rencana Timor Leste yang akan menjadikan bahasa Indonesia sebagai *working language* atau bahasa bekerja di Timor Leste.

“Kami mensupport rencana Timor leste menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pekerja, karena memang

dilihat dari sisi historis atau sejarahnya, dan budayanya dimana Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia sehingga hal yang wajar ketika bahasa kita akan dijadikan sebagai bahasa pekerja yang akan dipakai sehari-hari oleh para pekerja di Timor Leste,” papar Surahman.

Sementara itu, Ketua Komisi F Parlemto Nacional De Timor Leste, Virgilio Da Costa Hornai mengatakan, kunjungannya kali ini ke DPR adalah untuk belajar kepada Indonesia untuk mengelola Negara, sekaligus meminta dukungan dan bantuan kepada Indonesia untuk menyediakan jasa tenaga pendidikan dan kesehatan ke Timor Leste yang akan dibiayai oleh World Bank.

“Dalam hal anggaran kami memiliki dana yang tidak sedikit, namun permasalahannya SDM (sumber daya manusia) kami sangat terbatas, oleh karena itu kami memerlukan bantuan Indonesia untuk menyediakan SDM yang berkualitas, sehingga bisa mengembangkan negara kami,” harap Virgilio Da Costa Hornai.

Menanggapi hal tersebut, Surahman mengatakan bahwa selama ini Indonesia sudah mensupport Timor Leste, dimana sejauh ini sudah lima ribu mahasiswa Timor Leste yang belajar di Indonesia.

“Kami mensupport Timor Leste untuk bisa menjadikan dirinya sebagai bangsa berkembang. Selain itu pemerintah juga memiliki program Dharma Siswa untuk siswa luar yang ingin belajar di Indonesia. Hal ini bisa dijadikan sebuah kesempatan atau peluang bagi anak-anak muda Timor Leste yang ingin belajar di Indonesia,” ujar Surahman. (Ayu)/foto:ry/parle/iw.

Ketua DPR Membuka Seminar Percepatan Pencapaian MDG's

Ketua DPR RI Marzuki Alie, Rabu (26/6) membuka Seminar dan Bazar Percepatan Pencapaian MDG's dan Agenda Pasca 2015 serta Kebangkitan Perempuan Parlemen 2014 yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen di Senayan, Jakarta.

Dalam pembukaan acara yang akan berlangsung selama tiga hari itu, Marzuki mengatakan bahwa acara tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai forum internasional seperti yang diselenggarakan di Bali pada Maret lalu. Dimana dalam pertemuan

tersebut disetujui delapan butir kesepakatan MDG's (*Millenium Development Goals*), salah satunya adalah kesetaraan gender. Namun pada kenyataannya, Marzuki menilai tidak seluruh butir kesepakatan tersebut dapat dengan mudah diwujudkan atau

sesuai harapan.

Dikatakannya, dari delapan butir kesepakatan MDG's hanya butir kesetaraan gender yang sejauh ini dapat dijalankan. Butir lainnya seperti adanya kuota 30 persen bagi perempuan untuk masuk di kursi parlemen, untuk mewujudkan hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Budaya menjadi salah satu alasan kurang dapat tercapainya kesetaraan gender dalam bidang politik.

Belum lagi, pendapat yang mengatakan bahwa kuota 30 persen untuk perempuan dalam parlemen ini sebagai sebuah pemaksaan terhadap wanita untuk berkarir di dunia politik. Hal-hal seperti itu yang menurut Marzuki kerap menjadi hambatan tercapainya kesetaraan gender dengan baik.

“Kuota 30 persen itu bukanlah sebagai sebuah pemaksaan, melainkan pemberian ruang dan kesempatan oleh negara kepada kaum perempuan



Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Usmawarnie Peter menyerahkan cendera mata kepada Ketua DPR RI Marzuki Ali.

untuk berkecimpung di dunia politik atau di dalam parlemen,” kata Marzuki.

Mengingat, tambahnya, perempuan akan menjadi *role model* bagi perem-

puan lainnya, selain itu perempuan di parlemen juga akan merepresentasikan keterwakilan kaum perempuan lainnya. Karena sebelumnya tahun 2004 wanita di parlemen jumlahnya hanya 11 persen, tahun 2009 meningkat menjadi 18 persen, dan di 2014 mendatang kita berharap bahwa keterwakilan perempuan di parlemen benar-benar mencapai angka 30 persen.

Ditambahkannya, dalam acara yang juga dihadiri oleh utusan Khusus MDG's dari Presiden, Prof Dr Nila Moeloek, ia berharap agar seminar tersebut tidak hanya sebatas obrolan dalam ruang seminar saja, melainkan dalam bentuk langkah konkret sesuai dengan peran atau fungsi parlemen sendiri, baik fungsi legislatif, fungsi *budgeting* serta fungsi pengawasan. Sehingga setelah apa yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan, maka akselerasi pencapaian MDG's dan Agenda Pasca 2015 bisa seluruhnya terwujud. (Ayu) *foto:ry/parle*

Kisruh TKI di Jeddah, Ketua DPR Undang Kementerian Terkait



Ketua DPR RI Marzuki Ali berbincang dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR Supriyatno dan Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Terkait dengan kekisruhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jeddah yang terjadi beberapa waktu lalu, Ketua DPR Marzuki Ali mengundang Menteri

Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Selain itu, diundang pula Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah, Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno, dan Anggota Komisi I Muhammad Najib. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Ketua, Gedung Nusantara III, Rabu (26/6).

Pertemuan ini membahas nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kesulitan memperpanjang dokumen izin tinggal dan perjalanan di Arab Saudi. Selain itu, dibahas pula Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang belum banyak diketahui oleh TKI.

SPLP merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, dan diberikan kepada TKI melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) sebagai surat legalitas untuk TKI ilegal. Namun, ada TKI yang menganggap remeh surat tersebut.

“Saya meminta kementerian terkait untuk melakukan sosialisasi SPLP ke-

pada TKI. Masih banyak TKI yang belum mengerti, bahkan menganggap remeh manfaat surat tersebut. Karena tidak semua aturan di level pelaksanaan diinformasikan dengan benar. Nah, pendampingan pada TKI yang harus ditingkatkan. Lindungi, dan tempatkan mereka sesuai aturan,” jelas Marzuki.

Selain itu, politisi Demokrat ini meminta agar kisruh yang terjadi di KJRI lekas selesai dan tidak terulang lagi. Sebagaimana berita yang beredar, beberapa waktu lalu sejumlah TKI di Jeddah, Arab Saudi mengamuk di KJRI.

Para TKI mengamuk diduga karena dipicu lamanya pengurusan dokumen dan kurangnya pengorganisasian di konsulat. Akibatnya, 1 TKI tewas karena dehidrasi.

Dalam penjelasannya, Wamenkumham Denny Indrayana menyatakan bahwa KJRI di Arab Saudi kesulitan melayani permintaan pengurusan dokumen yang jumlahnya bisa mencapai 5.000 dokumen setiap hari. Jumlah itu membludak karena TKI diberikan waktu hingga hingga 3 Juli 2013 untuk mengurus dokumen, dan meleagalkan

keberadaan mereka di Arab Saudi.

“Imigrasi kami yang tersibuk itu di Jakarta Selatan, bisa mencapai 500 permintaan dokumen. Di Arab Saudi bisa mencapai 10 kali lipatnya. Untuk itu Menkumham akan mewakili Presiden untuk bertemu Pemerintah Arab Saudi dan meminta batas waktu kepemilikan dokumen diperpanjang. Perpanjangan waktu adalah langkah yang sebaiknya diambil untuk penyelesaian masalah TKI ini,” jelas Denny. (sf)

foto:wahyu/parle

Rapat Konsultasi RUU Ormas Hadirkan Pimpinan Organisasi Keagamaan

Pertemuan konsultasi.Pimpinan DPR yang membahas RUU Ormas, menghadirkan pimpinan organisasi keagamaan, Rabu (26/6). Rapat ini menindaklanjuti keputusan Rapat Paripurna DPR pada 25 Juni 2013 lalu yang merekomendasikan agar diadakan pertemuan konsultasi dengan Ormas-ormas keagamaan.

Pertemuan konsultasi dipimpin langsung Ketua DPR RI Marzuki Alie, didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pengurus PBNU, pengurus persekutuan gereja di Indonesia, pengurus Konferensi Waligereja Indonesia, dan lembaga persahabatan Ormas Islam.

“Rapat paripurna DPR pada 25 Juni 2013 telah mengagendakan pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan RUU tentang Ormas. Namun, rapat paripurna belum dapat mengambil keputusan terhadap RUU tentang Ormas tersebut. Dan rapat paripurna DPR memutuskan untuk diagendakan pertemuan konsultasi pimpinan DPR pada hari ini dengan pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan Pansus, dan juga organisasi kemasyarakatan,” jelas Marzuki.

Marzuki menilai, karena RUU ini belum tersosialisasikan dengan baik, maka DPR perlu mendengarkan pandangan Ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Dalam kesempatan pertemuan konsultasi itu, Din Syamsuddin memaparkan pandangannya sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Katanya, Muhammadiyah sangat tidak setuju dengan



Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, didampingi Wakil Ketua Deding Ishak berbincang dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

RUU Ormas ini, karena tidak ada urgensinya.

RUU ini menurut Din, justru bertentangan secara diame-tral dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Sementara Muhammadiyah dan NU, lanjut Din, sebetulnya bukan Ormas tapi gerakan kebudayaan yang tidak masuk dalam definisi RUU Ormas. “Maka ketika Muhammadiyah dan NU dikenai pasal RUU Ormas, berarti ada depolitisasi,” tandas Din.

Bila NU dan Muhammadiyah disebut Ormas, itu sama saja mereduksi 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Dan RUU ini sebenarnya lebih sekularistik. Din sekali lagi menjelaskan pandangannya bahwa RUU Ormas ini telah menjadikan superioritas negara atas masyarakat. Kontrol negara terlalu tinggi, bahkan dengan RUU Ormas ini negara bisa menuju otoritarianisme. (mh)*foto:wahyu/parle*

Ketua DPR Lantik Dua Anggota DPR PAW

Ketua DPR Marzuki Alie melantik dua orang anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Demokrat di Operation Room Gedung Nusantara DPR, Senayan, Rabu (26/6). Kedua anggota Dewan tersebut adalah Nuki Sutarno yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur XI, mengganti-

kan H. Achmad Syafi'i, kemudian Iman Tjahya Abdullah yang mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I menggantikan Taufiq Effendi.

Setelah pembacaan Keputusan Presiden, keduanya



Ketua DPR Marzuki Alie melantik dua orang anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW).

penandatanganan Berita Acara Sumpah dan pemberian ucapan selamat kepada kedua anggota PAW yang baru saja dilantik.

Ketua DPR Marzuki Alie berharap kedua anggota PAW yang baru saja dilantik dapat langsung menunjukkan performa yang optimal, terutama dalam kurun waktu produktif lebih kurang 1 tahun untuk menjabat sebagai anggota dewan.

Saat ditanyai mengenai masa waktu jabatan yang cukup singkat kurang dari 1 tahun, Nuki Sutarno mengatakan, sebagaimana yang telah diucapkan dalam sumpah ketika dilantik, dia akan tetap berusaha bersinergi dengan rekan-rekan di Komisi II untuk bersama-sama dalam mengem-

mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Ketua DPR dengan khidmat. Kemudian acara dilanjutkan dengan

ban tugas sebagai anggota DPR untuk kepentingan bangsa dan negara. (mp,vp)/foto:iwan armanias/parle.

Timwas Century Desak Tim Pengembalian Aset Optimalkan Tugasnya



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR mendesak Tim Pengembalian Aset untuk mengoptimalkan tugasnya, sebab tim yang diketuai Menkumham belum menunjukkan progress yang signifikan dan belum optimal. Demikian kesimpulan rapat Timwas Century DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman dengan Tim Pengembalian Aset di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6).

Hadir Tim Pengembalian aset yang diketuai Menkumham Amir Syamsudin didampingi Jaksa Agung Basrief Arief, Menkeu Chatib Basri, Wakil Jaksa Agung Darmono, Deputy Mensesneg dan jajarannya.

Untuk itu, Timwas Century DPR meminta Tim Pengembalian Aset menelusuri kembali aset Bank Century dan Robert Tantular dan kawan-kawan agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga. Selain itu melakukan segala upaya untuk penarikan aset dengan memperhatikan *cost and benefit*.

Timwas juga meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk mengkoordinir pembuatan matrik mengenai posisi aset sejak awal hingga saat ini serta upaya yang telah dilakukan dan prediksi waktu penarikan aset.

Pada kesimpulan lainnya Timwas Century mendesak Tim Pengembalian aset untuk memfasilitasi pelaksanaan putusan MA mengenai pengembalian ganti rugi kepada nasabah Antaboga

Delta Sekuritas oleh Bank Century (Bank Mutiara).

Menkumham Amir Syamsudin menjelaskan, temuan kurator sekitar aset Bank Century di Hongkong tahap sekarang ini uang cashnya 18 juta US dolar tetapi sifatnya *derivative* sehingga masih terus dianalisis. Informasi dari kepolisian Hongkong menyatakan bahwa hingga Juni 2012 terdapat 6 juta dolar dan aset stok yang mencapai 450 juta dolar dan katanya dapat dicairkan. Namun *Price Waterhouse Cooper* yang lebih berkompeten untuk menilai sejauh mana informasi kepolisian Hongkong tersebut tepat.

Sedangkan Jaksa Agung menyatakan, upaya pengembalian aset Bank Century yang tersimpan di Swiss dan Hongkong atas nama Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rivzi masih terus dilakukan oleh Tim Terpadu dari Kemenkeu, Kemlu, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK dan LPS. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Setujui Anggaran Perbaikan Infrastruktur Sekitar Rp 1 Triliun

Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama mengatakan, DPR telah menyetujui anggaran perbaikan infrastruktur sebesar kurang lebih Rp 1 Triliun.

“Anggaran itu untuk memperbaiki jalur infrastruktur yang labil,” ujar Laurens kepada wartawan, di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (26/6).

Menurutnya, pemerintah harus memiliki *master plan* yang komprehensif terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Perlu ada pemikiran

yang utuh terhadap pembangunan infrastruktur trans Sumatera, Papua secara berkesinambungan,” tambahnya.

Melalui cara ini, lanjutnya, dapat terjadi konektivitas antar wilayah sehingga laju perekonomian dapat meningkat. “Itu juga termasuk pembangunan selat Sunda, akan kita genjot percepatannya, saat ini pemerintah memang masih melakukan studi kelayakan dan kesiapan anggarannya,” katanya. (si)/
foto:iwan armanias/parle.



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama.

Ketua DPR Terima Kunjungan Presiden Vietnam



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima kunjungan Presiden Republik Sosialis Vietnam Truong Tan Sang.

Ketua DPR Marzuki Alie menerima kunjungan Courtesy Call Presiden Sosialis Vietnam H.E. Truong Tan Sang di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6). Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan kedua negara terutama di bidang ekonomi dan perdagangan.

“Ini kunjungan Presiden Sang yang pertama ke Indonesia. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vietnam dimulai pada tahun 1955 berarti sudah mencapai 60 tahun. Selama ini hubungan bilateral kedua negara berjalan dengan baik. Momentum ini

sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan ekonomi perdagangan kedua negara,” ujar Marzuki usai acara.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan sejumlah isu lain juga menjadi perhatian diantaranya bidang pendidikan, budaya, politik, dan bidang lainnya. Ia secara khusus mengapresiasi peranan Vietnam dalam hubungan kedua negara selama ini.

“Vietnam memiliki potensi sama dengan Indonesia, punya sumber daya alam yang besar. Kita berharap kedua negara dapat saling melengkapi,” tambahnya.

Terkait dengan peranan parlemen keduanya sepakat, sangat penting untuk mendorong hubungan kerjasama antar pemerintah. Berbagai hal dapat didiskusikan oleh parlemen, dan kemudian disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, dibahas pula kerjasama bilateral dalam penetapan batas landas kontinen terkait dengan *illegal fishing*. Kedua negara telah meratifikasi Persetujuan Penetapan Batas Landas Kontinen antara Indonesia dengan Vietnam pada 26 Juni 2003 yang diratifikasi pada Mei 2007.

“Tentang batas laut, sudah disepakati oleh kedua negara. Nelayan Indonesia yang masuk ke laut Vietnam, ataupun sebaliknya, bisa dilakukan kerjasama dalam hal pengawasannya melalui patroli. Kami berharap langkah-langkah untuk menertibkan *illegal fishing* ini berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Sang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Indonesia atas dukungan kepada Vietnam selama ini. Ia juga mengungkapkan rasa senangnya atas hubungan kedua parlemen yang cukup baik, dan berharap kerja sama ini dapat ditingkatkan. (sf)/*foto:wahyu/parle.*



Ketua DPR Marzuki Ali menerima hasil laporan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Negara yang diserahkan oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo dilanjutkan foto bersama Pimpinan Lembaga Negara di ruang auditorium BPK RI. Rabu (24/6). Foto: Denus/Parle.



Badan Kerja Sama Antar Parlemen dipimpin Ketuanya, Surahman Hidayat menerima kunjungan delegasi Komisi F Palemento Nacional De Timor Leste dipimpin Virgilio Da Costa Hornai, Selasa (25/6) di ruang rapat BKSAP, Senayan Jakarta.foto:Rizka/parle



Sekjen DPR Winantuningtyastiti (kanan) dan para karyawan Setjen DPR RI membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan Anti Narkoba di halaman Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI. Rabu (26/6). Foto: Wahyu/Parle.